

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup merupakan landasan untuk para pelaksana program pembangunan guna bisa menguasai hubungan antara penerapan program pembangunan dengan pengelolaan lingkungan (Damarwanto, 2015). Dunia disaat ini mengalami permasalahan serius berupa kenaikan permintaan global terhadap pangan, tenaga serta infrastruktur yang berdampak terhadap ekologi dunia tidak sanggup memenuhi sehingga terjadi kenaikan harga komoditas, energi, polusi tidak terkontrol gangguan kesehatan manusia serta menyebabkan keanekaragaman hayati menjadi hilang. Masalah ini mendesak munculnya kebijakan pertumbuhan dapat mensinergikan pertumbuhan ekonomi dengan keterbatasan sumber energi alam serta upaya melindungi lingkungan yaitu *green growth* (World Economic Forum, 2012).

Konsep *green growth* yang mengusung pembangunan berkelanjutan bermakna apabila pemanfaatan sumber energi dapat berkontribusi terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diutamakan masyarakat setempat serta lingkungan. Pelaksanaan program *green growth* dijabarkan dalam bentuk aktivitas pembangunan langsung dengan menyentuh masyarakat secara merata dan adil, sebab *green growth* dapat meningkatkan kemandirian daerah (Bayurini, 2022). Melalui *green growth*, diharapkan segala sektor serta bisa terintegrasi untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam, dan menghindari polusi serta menciptakan kesejahteraan masyarakat (Palupi, 2022).

Pengembangan *Green Growth Framework* (GGF) dari berbagai pihak baik pemerintah maupun non-pemerintah (Institute, 2015). Pemerintah di berbagai

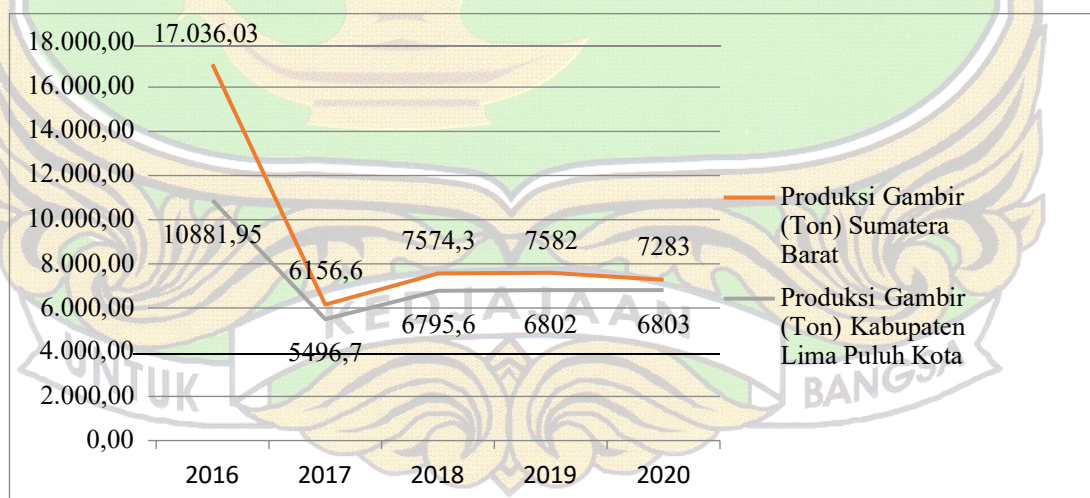
sektor, perusahaan dan petani didorong untuk meningkatkan dukungan terhadap produk dan layanan berkelanjutan di seluruh provinsi atau kabupaten di Indonesia. *Green Growth Framework* (GGF) akan membantu memotivasi pemerintah, bisnis, petani dan masyarakat sipil untuk berkolaborasi dalam mempertahankan ekosistem yang sehat dan tangguh untuk pertumbuhan inklusif dan masyarakat yang lebih sejahtera serta mengurangi emisi dari hutan, perubahan penggunaan lahan dan emisi industri (Kasztelan, 2017).

Lima hasil kinerja *green growth* diharapkan dapat membentuk *Green Growth Framework* (GGF) (GGGI, 2014). Hasil yang diharapkan tersebut terdiri dari: pertama, pentingnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan untuk menjadikan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan beragam serta berguna menunjang pembangunan berorientasi pada masyarakat. Kedua, pertumbuhan yang inklusif dan adil untuk kepentingan semua segmen masyarakat, baik untuk kelompok kaya ataupun kelompok miskin. Ketiga, ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan berguna untuk menekankan pertumbuhan dalam membangun kapasitas untuk memelihara atau memulihkan stabilitas ekonomi, keuangan, sosial dan lingkungan dalam menghadapi guncangan. Keempat, ekosistem penyedia jasa yang sehat dan produktif menekankan pertumbuhan untuk melestarikan modal alam, seperti cadangan sumber daya alam untuk memasok aliran manfaat yang berkesinambungan dalam bentuk jasa ekosistem. Kelima, pengurangan emisi gas rumah kaca menekankan pentingnya pertumbuhan rendah karbon untuk memberikan kontribusi untuk upaya global, nasional ataupun daerah buat menanggulangi perubahan iklim dan meminimalkan resiko untuk masyarakat lokal serta internasional, sekaligus meningkatkan keamanan energi masa depan

(Bappenas, 2020).

Sektor yang diharapkan dapat mewujudkan *green growth*, salah satunya adalah sektor pertanian yang berperan dalam pembangunan berkelanjutan pada suatu negara (Abdullah *et al.*, 2021). Sektor pertanian yang dipandang sebagai strategi mewujudkan *green growth* adalah pertanian gambir (Aulia *et al.*, 2021). Indonesia memiliki empat provinsi di Sumatera yang menjadi produsen gambir terbesar yaitu salah satunya Provinsi Sumatera Barat (Dhalimi, 2006).

Berdasarkan data BPS Sumatera Barat (2022) bahwa penghasil gambir terbesar dan memiliki lahan gambir yang luas di Indonesia adalah Provinsi Sumatera Barat. Menurut BPS Provinsi Sumatera Barat (2021) bahwa luas lahan gambir sebesar 28.016 Ha pada tahun 2020. Sedangkan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah penghasil gambir terluas di Provinsi Sumatera Barat dengan luas 16.574 Ha pada tahun 2020, sehingga sumber mata pencaharian yang utama bagi masyarakat di daerah tersebut yaitu usaha gambir. Pendapatan masyarakat sangat bergantung pada harga dan pemasaran gambir (Kurniawan, *et al.*, 2019).



Grafik 1.1

Produksi Gambir Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota

Sumber: (BPS Sumatera Barat, 2022)

Berdasarkan Grafik 1.1 dijelaskan bahwa produksi gambir di Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2016 -2020 berfluktuatif cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 produksi gambir di Sumatera Barat sebesar 17.036,03 ton kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi sebesar 6.156,60 ton, selanjutnya untuk tahun 2018-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya menjadi masing-masing sebesar 7.574,30 ton, 7.582 ton dan 7.583 ton pada tahun 2020. Hal ini juga dialami oleh produksi gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota bahwa pada tahun 2016 produksi gambir sebesar 10.881,95 ton kemudian menurun menjadi sebesar 5.496,70 ton pada tahun 2017 selanjutnya untuk tiga tahun terakhir produksi gambir mengalami peningkatan menjadi sebesar 6.795,60 ton pada tahun 2018, 6.802 ton pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 produksi gambir mengalami peningkatan menjadi sebesar 6.803 ton. Komoditi perkebunan terluas dan penyumbang jumlah produksi gambir terbesar di Kabupaten Lima Puluh Kota dihasilkan dari Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Kecamatan Kapur IX (Saputra, 2017). Berdasarkan data BPS Kabupaten Lima Puluh Kota (2021) bahwa di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan luas lahan gambir sebesar 4.427 Ha dan produksi gambirnya sebesar 7.826,69 ton. Sementara di Kecamatan Kapur IX dengan luas lahan gambir sebesar 7.751 Ha dan hasil produksi gambir sebesar 3.439,35 ton.

Peningkatan produksi gambir yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Kecamatan Kapur IX yang menyebabkan gambir di ekspor dengan negara tujuan seperti India, Pakistan, Yaman, Jepang, Thailand, Singapura dan Brunei Darussalam, sehingga menyebabkan tanaman gambir menjadi komoditi unggulan di Kabupaten Lima

Puluh Kota, yang tentunya diharapkan masyarakatnya menjadi sejahtera. Harapan selanjutnya dapat membuka lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan pengumpul gambir, yang berdampak terhadap terjadinya peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakatnya serta pengurangan kemiskinan (Sari, 2021). Namun, harapan tidak sesuai dengan kenyataan yang dirasakan karena adanya paradoks bahwa gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak dinikmati oleh pengumpul gambir. Hal ini diduga akibat sistem pemasaran gambir yang lemah dan kurangnya peran kelembagaan dalam bidang pemasaran gambir, sehingga hal ini menyebabkan sistem pemasaran gambir belum efisien (Nasution *et al.*, 2017).

Sistem budidaya gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota masih konvensional, agroindustri pengolahan gambir masih lemah, peran kelembagaan gambir masih buruk, dan pemasaran gambir tidak efisien (Afrizal, 2009). Hal ini di dukung penelitian Idrus (2012) bahwa perkembangan sektor agroindustri gambir tidak terwujud, dan mekanisme pembentukan harga gambir juga ditentukan oleh eksportir dan importir gambir. Menurut Afrizal (2009) bahwa eksportir merupakan tindakan dari lembaga pemasaran untuk menentukan harga gambir, dengan cenderungnya informasi harga yang tertutup pada tingkat eksportir maupun importir yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian harga bagi pengumpul gambir. Hal ini diperkuat dengan dugaan tidak efisiennya sistem pemasaran gambir karena harga di tingkat eksportir tidak terintegrasi dengan harga di tingkat pengumpul gambir. Selain itu, harga *riil* di pasar internasional juga tidak diketahui merupakan permasalahan dalam kegiatan pengembangan gambir (Evalia *et al.* 2012).

Terlebih lagi sulitnya informasi terkait harga internasional dari lembaga pemerintahan sehingga tertutupnya informasi harga gambir yang menyebabkan lemahnya *bargaining power* pengumpul gambir dan menempatkan pengumpul gambir sebagai *price taker* dalam sistem pemasaran gambir (Nasution *et al.*, 2015). Hal ini akan berdampak terhadap kesejahteraan pengumpul gambir menjadi menurun sehingga penerapan analisis *green growth* belum terwujud (Hosen, 2017) karena pencapaian kesejahteraan manusia serta menjaga keseimbangan alam, agar manusia dapat hidup sejahtera serta berkelanjutan yang perlu didukung dan diwujudkan secara bersama merupakan salah satu tujuan dari *green growth* (Solihin, 2022).

Hal ini sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Oktavia & Andrianus (2022) meneliti tentang produksi gambir di Kecamatan Bukik Barisan belum sejahtera yang diukur dari penghasilan pertiga bulan masih dibawah UMR disebabkan oleh produktivitas dan kualitas gambir dihasilkan masih rendah karena pengolahannya masih sederhana ditambah lagi dengan harga pasaran gambir tidak menentu, namun hasil penelitian ini membuktikan bahwa tanaman gambir sudah termasuk tanaman *green growth*. Selanjutnya penelitian Rio Christiawan (2020) membahas tentang implementasi *green growth* pada industri pertanian kelapa sawit menyimpulkan bahwa belum terwujudnya pendekatan *green growth* pada industri kelapa sawit di Indonesia.

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting karena sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya pada sektor ini, sehingga dibutuhkan peran pemerintah dalam membuat program-program di sektor pertanian untuk penguatan ketahanan pangan dan peningkatan

kesejahteraan petani (Suyatno, 2000). Kemajuan menuju perbaikan kondisi kehidupan manusia dengan memperhatikan aspek lingkungan dan bersifat dinamis merupakan hakikat dari pembangunan ekonomi berkelanjutan. Namun kenyataan yang terjadi bahwa prinsip *green growth* bagi pengumpul gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota belum seluruhnya terwujud karena pendapatan pengumpul gambir masih rendah disebabkan oleh harga beli gambir yang rendah, dan tingkat kesejahteraan pengumpul gambir berada pada tingkat keluarga kurang sejahtera.

Berdasarkan penjabaran diatas, peneliti perlu mengetahui tentang aktivitas pengumpul gambir dalam mewujudkan *green growth* dan mengetahui implementasi kebijakan dalam mewujudkan *green growth* di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul tentang **“Analisis Kinerja Implementasi Prinsip *Green Growth* pada Aktivitas Pengumpul Gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota (Studi Kasus: Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Kecamatan Kapur IX)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini berdasarkan penjelasan latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis aktivitas dalam mewujudkan *green growth* pada proses pengumpul gambir Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Kapur IX di Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimana implementasi kebijakan dalam mewujudkan *green growth* di Kabupaten Lima Puluh Kota?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis aktivitas dalam mewujudkan *green growth* pada proses pengumpul gambir Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Kapur IX di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengumpul gambir dalam mewujudkan *green growth* di Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, menjadi acuan sebagai bahan evaluasi analisis aktivitas dalam mewujudkan *green growth* pada proses pengumpul gambir di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Kecamatan Kapur IX dan mengetahui implementasi kebijakan pengumpul gambir dalam mewujudkan *green growth* di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Bagi masyarakat umum, diharapkan berguna untuk menambah informasi dan pengetahuan terkait *green growth*.
3. Bagi mahasiswa, diharapkan menjadi bahan informasi, referensi, literatur maupun penelitian lebih lanjut mengenai *green growth*.
4. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan tentang aktivitas dalam mewujudkan *green growth* pada proses pengumpul gambir Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Kapur IX serta mengetahui implementasi kebijakan dalam mewujudkan *green growth* di Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.5 Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan tesis peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, terdiri dari penjelasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan dari tiap- tiap bab berupa penjelasan dari isi penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, menjelaskan tentang teori- teori serta landasan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran teoritis serta empiris tentang pembangunan berkelanjutan, *green growth*, aktivitas proses pengumpul gambir serta implementasi kebijakan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, terdiri dari penjelasan menggunakan desain penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode analisis.

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Pada bab ini, menjelaskan tentang letak geografis dan wilayah administratif, keadaan penduduk dan ketenagakerjaan, karakteristik gambir dan karakteristik responden pengumpul gambir.

BAB V HASIL PENELITIAN ANALISIS KUANTITATIF

Pada bab ini, terdiri dari penjelasan tentang analisis kuantitatif *green growth* yang terdiri dari analisis pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pertumbuhan inklusif dan adil, ketahanan sosial, ekonomi

dan lingkungan, ekosistem penyedia jasa yang sehat dan produktif serta pengurangan emisi gas rumah kaca.

BAB VI HASIL PENELITIAN ANALISIS KUALITATIF

Pada bab ini, terdiri dari penjelasan tentang analisis kualitatif *green growth* yang terdiri dari analisis pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pertumbuhan inklusif dan adil, ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan, ekosistem penyedia jasa yang sehat dan produktif serta pengurangan emisi gas rumah kaca dan implikasi kebijakan *green growth*

BAB VII PENUTUP

Pada bab ini, terdiri dari penjelasan kesimpulan penelitian dan saran penelitian.

